

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki populasi besar. Dengan penduduk yang tergolong besar memberikan tantangan terhadap suatu negara sehingga negara tersebut harus memahami situasi yang terjadi termasuk faktor yang dapat memperkuat ekonomi yang besar di negara tersebut (World Bank Group, 2024). Maka dari itu Tenaga kerja merupakan aspek vital dalam proses pembangunan suatu negara. Setiap negara memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan dapat diandalkan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Wahyu & Yuliana, 2023). Di Indonesia, regulasi terkait ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap Individu yang dapat menjalankan aktivitas yang bermanfaat untuk menciptakan produk atau layanan, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain.

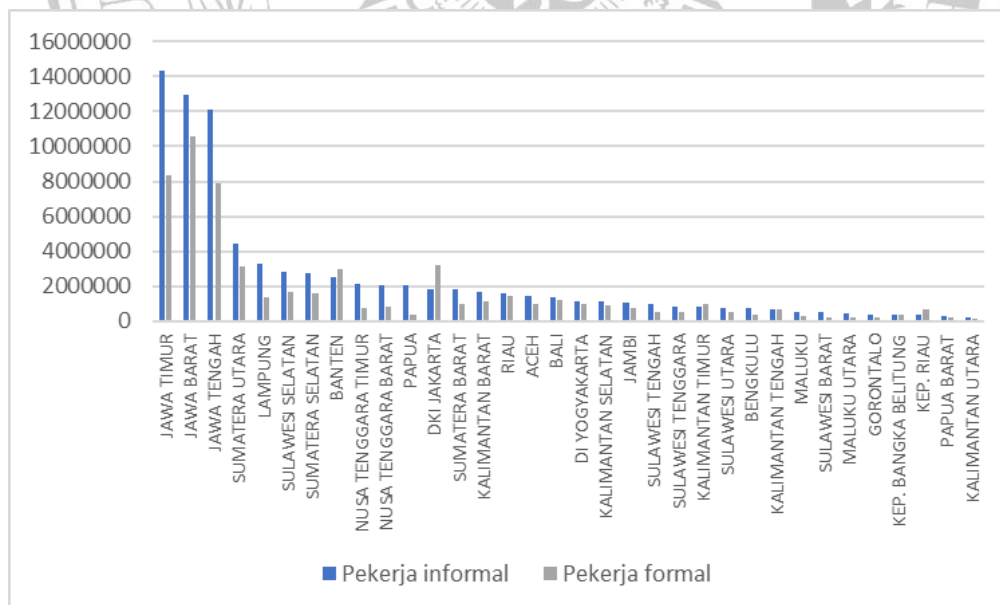
Dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia, sektor informal juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Banyak orang terpaksa mencari pekerjaan di sektor informal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena syarat untuk masuk ke dalam pekerjaan informal tidak terlalu ketat namun pekerja di sektor ini sering kali tidak mendapatkan perlindungan dari regulasi ketenagakerjaan, sehingga mereka rentan terhadap kondisi kerja yang tidak layak (Hendro et al., 2021). Situasi ini bisa menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, karena pekerja informal menghadapi berbagai

tantangan, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika sektor informal agar dapat merumuskan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif karena sektor Formal pun terkadang belum mampu menampung banyaknya tenaga kerja di Indonesia. Menurut ILO (2010) meskipun begitu, pekerja di Indonesia termasuk yang bekerja di sektor informal, sering kali memiliki waktu kerja yang lebih lama, yaitu rentan terhadap pekerjaan tidak layak.

Menurut pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertumbuhan ekonomi harus inklusif, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama UMKM, dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Selain itu, peningkatan kualitas dan keamanan pekerjaan, serta kesetaraan gender di lingkungan kerja sangat krusial untuk membangun suasana kerja yang adil dan produktif. Kebijakan yang mendorong investasi serta kerjasama antara sektor publik dan swasta juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pekerjaan yang berkualitas (Statistik, 2024).

Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis dan mengkaji pekerja sektor Informal di Indonesia. Menurut Tasmilah et al., (2023) modal manusia memiliki peran penting dalam menentukan keberlanjutan status kerja formal selama masa pandemi COVID-19. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman mengikuti pelatihan, serta kemampuan dalam menggunakan teknologi digital dan internet, terbukti dapat mengurangi kemungkinan pekerja

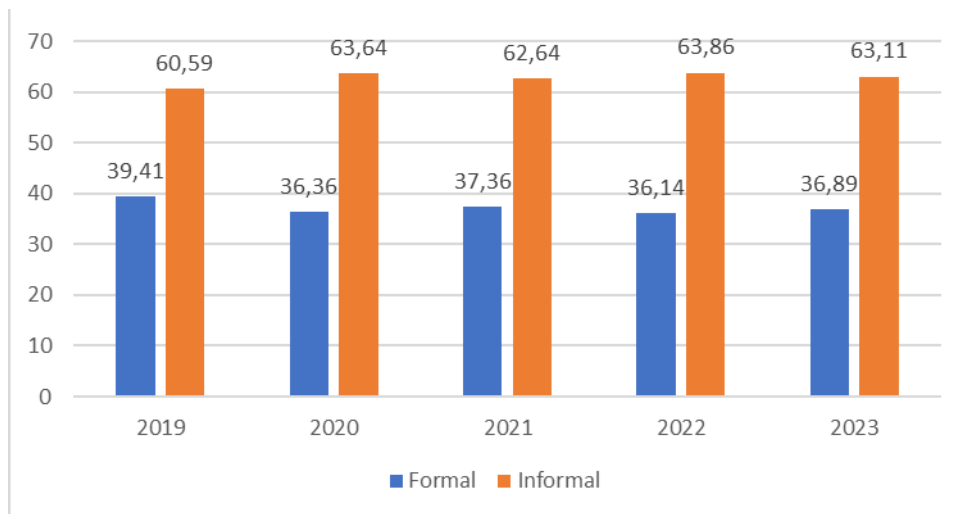
formal beralih ke sektor informal atau menjadi pengangguran. Sebaliknya, pekerja yang memiliki keterampilan dan juga pengalaman kerja cenderung dapat bertahan di sektor informal jika kehilangan pekerjaan formal, sehingga mereka tidak sepenuhnya keluar dari pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, penguasaan teknologi dan investasi dalam pendidikan serta pelatihan dapat menjadi kunci untuk menjaga kestabilan pekerjaan formal di tengah krisis seperti pandemi. Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bukan proses yang seragam. Setiap negara memiliki tantangan unik dan harus menyesuaikan strateginya dengan kondisi lokal. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif semakin menjadi perhatian, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Pertiwi, 2015).



Sumber : Publikasi Angkatan Kerja Nasional tahun 2023

Gambar 1.1 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Indonesia tahun 2023

BPS mencatat bahwa pada Agustus 2023 terdapat 14.329.076 pekerja informal di Jawa Timur. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor informal memiliki kontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Sektor ini tidak terlalu menuntut keahlian dan keterampilan khusus, sehingga menjadi wadah bagi pengembangan sumber daya manusia melalui aktivitas produktif yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja dibandingkan dengan sektor formal. Jawa Timur pada tahun 2023 memiliki penduduk sebesar 41 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan jumlah tersebut dari tahun ke tahun semakin bertambah. Meskipun demikian, Jawa Timur dikenal sebagai provinsi yang paling kompleks dan beragam. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan antar wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selain itu, Jawa Timur juga menunjukkan nilai konstanta tertinggi, yang menunjukkan pengaruh dari variabel seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan upah minimum provinsi, serta kepadatan penduduk. Ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur cenderung berada pada tingkat yang paling tinggi (Lim, 2021). Ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur cukup signifikan, yang menyebabkan banyak individu terlibat dalam pekerjaan informal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi, akses terhadap sumber daya, serta layanan publik yang tidak merata di Jawa Timur. Sebagai hasilnya, banyak orang memilih bekerja di sektor informal guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketidakmerataan pembangunan dapat memperburuk situasi ekonomi dan sosial di provinsi ini.



Sumber : Publikasi BPS tahun 2019-2023

Gambar 1.2 Perkembangan Status Pekerjaan di Jawa Timur 2019-2023

Selama rentan waktu 5 tahun yang digambarkan angka pekerja informal lebih tinggi yaitu dalam kisaran 60-63%, sementara itu untuk pekerja formal lebih rendah berada di kisaran angka 36-37%. Serta provinsi Jawa Timur sebagai provinsi tertinggi nomor satu yang memiliki pekerja Informal tertinggi di Indonesia tahun 2023. Fakta ini mengindikasikan bahwa pekerja informal masih menjadi permasalahan yang tinggi di Jawa Timur, sehingga membuktikan banyak tenaga kerja tidak terserap, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor seperti minimnya lapangan usaha, pendidikan maupun pelatihan. Meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun kondisi ini menunjukkan perlunya upaya khusus untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja di Jawa Timur ini agar stabilitas pertumbuhan ekonomi terjaga dan kelayakan kerja serta hak para pekerja di sektor Informal.

Pekerja sektor informal adalah individu yang menjalankan aktivitas ekonomi atau usaha secara mandiri dan independen dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usaha yang dijalannya tersebut. Mereka tidak terikat dengan hubungan kerja formal atau aturan-aturan

ketenagakerjaan yang ketat. dengan kata lain, pekerja sektor informal merupakan pekerja yang mengandalkan kemampuan dan inisiatif pribadi dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka tidak berada di bawah naungan perusahaan atau instansi formal, sehingga memiliki keleluasaan dalam mengelola waktu, tempat, dan cara bekerja (Ardianingsih et al., 2021). Dengan hal ini Sektor pekerjaan informal telah menjadi fenomena umum di banyak negara berkembang. Meskipun berperan dalam kegiatan ekonomi, sektor ini seringkali dikaitkan dengan kondisi kerja yang kurang menguntungkan. Para pekerja di sektor informal cenderung menerima upah yang lebih rendah, menghadapi pekerjaan yang lebih berat dan berisiko, serta memiliki jaminan keamanan dan perlindungan yang minim dibandingkan dengan pekerja di sektor formal (On Madya & Nurwahyuni, 2019).

Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi besar-besaran, serta terbatasnya lapangan kerja formal menjadi pendorong utama berkembangnya sektor ini. Karakteristik pekerja informal sangat beragam, meliputi berbagai latar belakang seperti jenis usaha, status pernikahan, pendidikan, pelatihan, akses internet, dan jenis kelamin. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan dalam sektor informal berbanding terbalik dengan tingkat keterampilan yang dimiliki. Artinya, semakin rendah keterampilan seseorang, maka semakin besar kemungkinannya untuk terlibat di sektor informal. Sebaliknya, semakin tinggi keterampilan yang dimiliki, peluang untuk bekerja di sektor formal akan semakin besar (Hazans, 2021).

Banyak dari sebagian orang memilih bekerja di sektor informal karena fleksibilitas yang ditawarkan, terutama bagi perempuan yang ingin mengombinasikan pekerjaan dengan tanggung jawab domestik. Namun, sektor ini juga menjadi pilihan terpaksa bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal atau membutuhkan sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Chen et al., 2015). Kondisi ini terjadi setelah melewati masa krisis akibat pandemi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berjalannya kembali berbagai aktivitas usaha. Namun demikian, kebangkitan ekonomi ini belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kondisi di sektor ketenagakerjaan. Banyak pekerjaan formal yang hilang selama pandemi belum tergantikan dengan lapangan kerja baru yang memiliki kualitas dan perlindungan yang setara. Akibatnya, jumlah tenaga kerja di sektor informal masih tetap tinggi dan bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat karena kondisi yang mendukung.

Menurut Ummah, (2019) Karakteristik pekerja informal di negara-negara dengan ekonomi pasar berkembang sangat beragam, sehingga pendekatan kebijakan yang diterapkan pun perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing negara. Fokus tersebut dapat mencakup bidang-bidang yang tengah berkembang dan memiliki potensi besar, seperti pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi dapat menjadi alat penting dalam memperluas akses pelaku usaha informal ke layanan keuangan, pasar, dan sistem administratif, sehingga mendorong integrasi ke dalam ekonomi formal. Namun, pemanfaatannya harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kapasitas digital di masing-masing

wilayah. Dalam era global saat ini, kerja sama internasional ekonomi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan. Namun, setiap negara tetap perlu memperhatikan kemandirian ekonomi dan ketahanan terhadap guncangan eksternal, pekerjaan informal lebih dipilih karena waktu yang fleksibel serta waktu pekerja dalam kelompok informal menjalankan untuk aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang berorientasi pasar (Raveendran & Vanek, 2020).

R. D. Sari, (2016) Hasil analisis kebutuhan pelatihan tenaga kerja sektor informal yang dilakukan oleh tim pelaksana dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, perencanaan program pelatihan telah dirancang sesuai dengan pendekatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Penentuan tema pelatihan dilakukan oleh tim di Sub Bidang Perluasan Kerja. Sementara itu, identifikasi kebutuhan peserta pelatihan dilaksanakan oleh Dinas di tingkat Kabupaten/Kota, melalui usulan yang disetujui oleh Dinas Provinsi. Model pelatihan yang digunakan masih mengacu pada format sebelumnya tanpa perubahan berarti selama lima tahun terakhir. Untuk metode pelatihan, digunakan pendekatan teori di kelas dan praktik langsung, sesuai dengan jenis pelatihan seperti Penciptaan Wirausaha Baru (WUB) dan pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis teknologi tepat guna.

Kurniawan, (2019) menyebutkan Profil pelaku usaha informal di Jawa Timur dapat dikenali melalui berbagai aspek, seperti perbedaan jenis kelamin, status perkawinan, dan rentang usia. Selain itu, latar belakang pendidikan, keterampilan yang dimiliki sebelum memulai usaha, serta jumlah tenaga kerja

tetap yang terlibat juga menjadi indikator penting. Aspek lain yang turut diperhatikan meliputi tingkat pendapatan, durasi atau lama usaha dijalankan, nilai aset yang dimiliki, tahun berdirinya usaha, bentuk legalitas usaha, hingga jenis sektor bisnis yang digeluti. Semua aspek ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik pelaku usaha informal di wilayah tersebut.

Penelitian ini akan mengisi gap terbatasnya penelitian sebelumnya terkait dengan pekerja informal karena belum banyak yang secara khusus membahas Dinamika Sektor Informal Pekerjaan di Jawa Timur khususnya pada masa pemulihan ekonomi dari 2 tahun sebelumnya yang terkena imbas dari pandemi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap pekerja Informal. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) khususnya di Jawa Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dengan mengkaji dari sumber sumber penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa status pekerjaan sektor Informal lebih tinggi dibandingkan dengan sektor Formal yang mengakibatkan permasalahan di dinamika pekerja informal. Maka dari permasalahan tersebut dapat ditarik 2 rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana gambaran karakteristik pekerja informal di Jawa Timur 2023?
2. Bagaimana pengaruh variabel Jenis Kelamin, Status Kawin, Pendidikan, Pelatihan, Internet, Lapangan Usaha dan Klasifikasi Wilayah terhadap sektor Informal di Jawa Timur?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah ditetapkan untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup penelitian mengenai dinamika sektor Informal pekerjaan di wilayah pedesaan dan perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Batasan ini penting agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Berikut adalah beberapa batasan yang ditetapkan:

1. Konteks Geografis

Penelitian ini hanya akan dilakukan di Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada perbandingan antara wilayah pedesaan dan perkotaan dan mengidentifikasi sektor fomal dan formal pekerjaan, Hal ini bertujuan untuk memahami perbedaan dinamika sektor informal yang mungkin terjadi di kedua jenis wilayah tersebut.

2. Variabel yang Diteliti

Penelitian ini akan membatasi variabel yang dianalisis, yaitu Jenis Kelamin, Status Kawin, Pendidikan, Pelatihan, Internet, Lapangan Usaha dan Klasifikasi Wilayah. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap status pekerjaan.

3. Waktu Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup informasi terkini hingga tahun 2023. Batasan waktu ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan kondisi dan dinamika terkini di pasar tenaga kerja.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik pekerja Informal di Jawa Timur pada tahun 2023.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh jenis kelamin, status kawin, pendidikan, pelatihan, internet, lapangan usaha dan klasifikasi wilayah terhadap pekerja informal di Jawa Timur tahun 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah memberikan informasi yang berguna bagi berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan dan para pencari lapangan pekerjaan, yang diantaranya :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk sektor informal. Dengan memahami perbedaan dinamika antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal dan merancang program yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program pelatihan dan pemberdayaan bagi pekerja di sektor informal.

2. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sektor informal, khususnya dalam konteks daerah Jawa Timur. Temuan dan analisis yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan serta diskusi akademis terkait dinamika sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk penelitian lebih mendalam mengenai perbedaan antara sektor informal dan formal, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhannya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini berpotensi memberikan pemahaman lebih baik mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja di sektor informal, serta pentingnya keberadaan sektor informal dalam perekonomian lokal. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja informal.